

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Desain penelitian kualitatif yaitu mempelajari setiap masalah dengan menemukannya pada situasi alamiah (Creswell, 1998). Sedangkan menurut Leininger, (1985 dalam Burns & Grove, 1999) desain penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan sistemik dan subyektif yang digunakan untuk menggambarkan dan memberikan arti pada pengalaman hidup.

Fenomenologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menguraikan suatu fenomena atau situasi tertentu sesuai pengalaman hidup yang dialami (Speziale & Carpenter, 2003). Sementara menurut Poerwandari (2005) fenomenologi adalah suatu penelitian kualitatif yang berfokus pada penemuan fakta mengenai suatu fenomena social yang ditekankan pada usaha untuk memahami perilaku manusia berdasarkan perspektif partisipan.

Alasan peneliti menggunakan desain kualitatif dengan metode fenomenologi karena dengan metode ini peneliti dapat memahami, menjelaskan dan memberi makna secara alamiah terhadap pengalaman hidup individu yang mengalami dampak psikososial sebagai akibat lumpur Lapindo di desa Pajarakan kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan pengalamannya selama bencana tersebut terjadi hingga penelitian ini dilakukan.

B. Rekrutmen Partisipan

Perekrutan partisipan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menetapkan populasi dan sampel. Populasi yang menurut Sugiono (2007) dalam penelitian kualitatif diistilahkan sebagai situasi sosial (*Social Situation*) dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Pajarakan yang mengalami dampak psikososial akibat Lumpur Lapindo. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat desa Pajarakan yang mengalami masalah psikososial. Proses seleksi sampel dilakukan dengan tehnik *purposive sampling*, yaitu tehnik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu sebagaimana yang diinginkan peneliti, dengan kriteria inklusi sebagai berikut:

- a. Bisa membaca dan menulis
- b. Berusia antara 20 tahun sampai dengan 65 tahun
- c. Sedang mengalami masalah psikososial, dengan skor penilaian kuesioner < 60
- d. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dengan baik
- e. Bersedia menjadi partisipan

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, di mulai pada awal Pebruari sampai Juli 2009. Penelitian ini dilakukan di desa Pajarakan kecamatan Jabon Sidoarjo sebagai salah satu desa yang masuk dalam wilayah peta terdampak Lumpur Lapindo. Alasan pemilihan tempat ini adalah masih menetapnya masyarakat di desa tersebut meskipun lumpur Lapindo sudah mengelilingi tempat tinggalnya. Disamping itu berdasarkan wawancara pendahuluan sudah ada masyarakat yang

mengalami masalah psikis dan sosial, misalnya depresi, mudah marah, pengangguran meningkat dan sebagainya.

Proses kegiatan ini dimulai dari pengembangan proposal sampai dengan perbaikan dan pengumpulan tesis. Rincian jadwal kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian Dampak Psikososial Korban Lumpur Lapindo di Desa Pajarakan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

		PEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proposal Penelitian	X	X	X	X	X	X																		
2	Ujian Proposal							X																	
3	Perbaikan Proposal								X	X															
4	Pengurusan Etik										X	X													
5	Pengumpulan dan Analisa data											X	X	X	X	X									
6	Penulisan Laporan																X	X	X	X	X				
7	Ujian hasil																				X				
8	Perbaikan Hasil penelitian/Tesis																				X	X			
9	Sidang Tesis																					X			
10	Perbaikan Tesis																					X	X		
11	Penulisan artikel untuk publikasi																					X	X		
12	Jilid Hard cover																						X	X	
13	Pengumpulan Tesis																								X

D. Etika Penelitian

Prosedur penelitian diawali dengan proses persetujuan etik yang diperoleh dari Universitas Indonesia dengan pertimbangan partisipan dalam penelitian ini adalah manusia. Partisipan akan mendapatkan penjelasan dari peneliti tentang studi Fenomenologi yang akan dilakukan, peran partisipan sebagai pemberi informasi, dan hak-hak partisipan termasuk didalamnya hak perlindungan

terhadap keamanan baik dari segi fisik maupun psikologis. Nilai-nilai etik yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah *otonomy*, *beneficence*, *Nonmaleficence*, *justice*, *Fidelity*, dan *veracity*.

Keterlibatan partisipan dalam penelitian ini merupakan keputusan sukarela, tanpa ada paksaan dan merupakan *otonomy* partisipan. Partisipan diberikan informasi tentang hak untuk memutuskan penelitian jika penelitian yang dilakukan dirasakan mengancam kenyamanan dan keamanan partisipan. Peneliti menjelaskan tentang keuntungan atau manfaat yang didapatkan oleh partisipan dan resiko yang mungkin dapat terjadi (prinsip *beneficence & Nonmaleficence*).

Partisipan juga mendapatkan perlakuan sama, dihormati hak-haknya tanpa dibeda-bedakan (*justice*). Pada prinsip *fidelity*, partisipan mendapatkan perhatian, semangat, dan optimisme dalam menjalani hidup, harapan yang memadahi dan menghormati kondisi partisipan saat ini. Sedangkan pada prinsip *veracity*, peneliti mengatakan kebenaran dan kejelasan informasi dan tujuan sebagaimana yang harus dituangkan dalam *informed consent*.

Setelah partisipan mengerti dan setuju untuk diwawancarai, selanjutnya partisipan menandatangani persetujuan penelitian sesuai dengan standard etik yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia. Kerahasiaan identitas partisipan dilindungi baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyajian hasil penelitian (*confidentiality*), dengan cara tidak mencantumkan nama partisipan namun hanya kode saja (misalnya P1 untuk partisipan 1, P2, P3 dan seterusnya). Pada studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini partisipan mampu

mengungkapkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu dampak psikososial yang dialami selama menjadi korban lumpur Lapindo ini.

Selama wawancara berlangsung tidak terjadi masalah etik dan semua partisipan mengikuti proses penelitian hingga akhir, tidak ada yang mengundurkan diri.

E. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah penting dan strategis. Hal ini disebabkan karena data dalam penelitian sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Menurut Sugiono (2007), terdapat dua hal penting yang mempengaruhi kualitas data penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas dalam pengumpulan data. Kualitas instrumen berarti kualitas peneliti sebagai instrumen, yaitu instrumen yang telah teruji validitas dan realibilitasnya.

Validasi instrumen meliputi pemahaman peneliti terhadap metode penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang akan diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki area penelitian. Sedangkan kualitas pengumpulan data dipengaruhi oleh sumber data dan tehnik pengumpulan data yang digunakan. Sumber data dalam penelitian meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang memberikan data secara tidak langsung misalnya melalui orang lain atau media. Bila dilihat dari tehnik atau cara pengumpulan data, maka data dapat didapatkan melalui cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan atau triangulasi (gabungan).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu anggota masyarakat yang mengalami dampak psikososial akibat lumpur Lapindo. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui tiga tahap yaitu tahap berdasarkan penunjukan atau rekomendasi dari key person, pengisian kuesioner dan wawancara mendalam.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan uji coba alat pengumpul data (instrumen penelitian) kepada salah satu anggota masyarakat korban lumpur Lapindo. Proses uji coba dilakukan setelah peneliti menjalani uji proposal dan mendapat persetujuan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Uji coba ini dilakukan untuk menyempurnakan kuesioner dan panduan wawancara yang telah disiapkan peneliti. Dalam uji coba tersebut didapatkan hasil skor kuesioner 31 dan transkrip verbatim.

Setelah peneliti memperoleh data dari uji coba instrumen diatas, selanjutnya peneliti berkonsultasi kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 tentang hasil yang peneliti dapatkan dari uji coba diatas. Pada proses bimbingan peneliti mendapatkan berbagai masukan dan saran yang berkaitan dengan panduan wawancara dan respon peneliti terhadap pernyataan partisipan agar wawancara yang dilakukan peneliti mendapat data atau pernyataan partisipan secara mendalam berdasarkan tujuan penelitian. Setelah proses konsultasi uji coba instrumen selesai, langkah selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan prosedur sesuai tahapan berikut ini:

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini ada beberapa langkah penting yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu *pertama*, melakukan proses perijinan. Peneliti mengajukan prosedur perijinan penelitian kepada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) tentang penelitian yang berjudul “Dampak Psikososial Akibat Bencana Lumpur Lapindo”. Pengajuan perijinan penelitian ini dilakukan setelah proposal penelitian ini dinyatakan Lolos Kaji Etik. Setelah peneliti memperoleh surat keterangan atau ijin dari FIK, peneliti menyerahkan surat tersebut kepada birokrasi yang ada di desa Pajarakan untuk memperoleh ijin melakukan penelitian sekaligus menjelaskan maksud, tujuan, dan kegunaan penelitian dilakukan.

Kedua, Setelah ijin diperoleh, peneliti memberikan penjelasan kepada *key person* yang telah ditunjuk tentang proses pengumpulan data yang akan dilakukan dan kriteria partisipan yang diinginkan dalam penelitian ini. Orang yang ditunjuk sebagai *key person* adalah anggota masyarakat korban yang masih bertempat tinggal di desa Pajarakan dan diyakini mempunyai pemahaman yang baik tentang masalah kesehatan termasuk masalah psikososial.

Tahap kedua, setelah mendapat ijin dan penandatanganan surat ijin penelitian dari Kepala Desa Pajarakan, peneliti menentukan *key person* untuk memulai melakukan interaksi, seleksi, wawancara dan atau observasi. *Key person* adalah tokoh formal maupun informal yang ada di masyarakat dimana

penelitian dilakukan yang diyakini memahami tentang obyek penelitian (Bungin, 2008). Orang yang ditunjuk sebagai *key person* dalam penelitian ini adalah tokoh formal yaitu sebagai ketua RW. Peneliti meyakini bahwa *key person* adalah orang yang memahami obyek penelitian. Selain sebagai tokoh masyarakat, *key person* juga seorang tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang memahami masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat korban lumpur Lapindo. Peran *key person* adalah memberikan informasi tentang kondisi partisipan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dijelaskan peneliti sesuai kriteria inklusi penelitian

Ketiga, setelah menemukan *key person*, selanjutnya peneliti bersama *key person* mendatangi calon partisipan dan membina hubungan saling percaya dengan cara perkenalan dan menjelaskan tujuan kedatangan peneliti. Proses ini dilakukan peneliti selama sepuluh hingga lima belas menit. Hubungan saling percaya ini dibuktikan dengan kesediaan calon partisipan untuk terlibat dalam penelitian ini.

Keempat, setelah calon partisipan bersedia, selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai hak-hak partisipan dan kewajiban partisipan. Hak partisipan antara lain mendapatkan kenyamanan baik fisik maupun psikologis, melakukan dengan sukarela (sukarela), menentukan waktu dan tempat wawancara dilakukan, dan hak mendapatkan dukungan secara emosional baik dari peneliti maupun *key person*.

Sementara kewajiban partisipan adalah memberikan informasi yang sebenarnya dan menyeluruh mengenai dampak yang dirasakan terutama dampak psikologis (emosi/kejiwaan) dan dampak sosial selama mengalami bencana lumpur Lapindo. Setelah partisipan memahami dan setuju dengan yang dijelaskan peneliti, partisipan mengisi *informed consent (ic)* sebagai pernyataan tertulis tentang kesediaan partisipan untuk terlibat pada penelitian yang dilakukan.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini terdiri dari dua kegiatan yaitu pengisian kuesioner oleh partisipan dan wawancara antara peneliti dan partisipan.

a. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan oleh partisipan dengan tujuan untuk memastikan bahwa partisipan adalah benar-benar anggota masyarakat korban yang sedang mengalami masalah psikososial. Daftar pertanyaan dalam kuesioner dimodifikasi dari instrumen yang dikembangkan oleh Smit (2005), gejala-gejala psikososial Hopkins dan DSM IV. Jumlah pertanyaan dalam kuesioner 30 soal dalam bentuk skala likert. Untuk jawaban selalu akan diberi skor 1, hampir selalu skor 2, kadang-kadang skor 3, dan tidak pernah skor 4. Penentuan masalah psikososial ini berdasarkan pada nilai skor dari kuesioner yang telah diisi. Jika mendapat skor antara 91-120 berarti mempunyai kesehatan mental yang sangat baik. Skor antara 61-90 tergolong baik atau rata-rata. Skor antar 30-60 berarti buruk atau sedang ada masalah psikologis maupun sosial (psikososial) dan skor antar 0-30 adalah sangat buruk. Nilai skor yang diperoleh oleh

partisipan dalam penelitian ini dari yang paling rendah adalah 46 dan paling tinggi 58

b. Wawancara mendalam

Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam (*in depth interview*) bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai dampak psikososial yang dialami anggota Masyarakat. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pertanyaan semi terstruktur dalam waktu rata-rata 30-50 menit. Peneliti melakukan wawancara dengan memperhatikan tiga hal, yaitu persiapan sebelum wawancara (pra anamnesa), saat wawancara, dan akhir wawancara (terminasi).

1) Persiapan sebelum wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan lingkungan tempat dilangsungkannya wawancara sehingga wawancara dapat dilaksanakan dengan baik dan tenang. Selain itu, posisi tempat duduk dan orang yang dapat mengikuti selama wawancara berlangsung juga disampaikan peneliti sebelum wawancara dilangsungkan. Peneliti juga menjelaskan bahwa wawancara yang dilaksanakan direkam oleh peneliti dan dipastikan bahwa alat perekam dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Alat perekam yang digunakan peneliti adalah *voice record digital*. Selain itu, peneliti juga membawa daftar pertanyaan wawancara tidak terstruktur, lembar catatan lapangan atau *field note*, alat tulis dan

kesiapan peneliti sebagai instrumen. Kontrak waktu disampaikan pada saat persiapan ini. Pada penelitian ini, semua partisipan yang telah ditentukan oleh *key person* menyetujui untuk menjadi partisipan

2) Saat wawancara

Wawancara dilakukan kepada partisipan sesuai kontrak waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka (*open – ended interview*), yaitu memberikan kesempatan kepada partisipan untuk menjelaskan sepenuhnya pengalaman mereka tentang fenomena yang sedang diteliti (Speziale dan Carpenter, 2003), yaitu pengalaman partisipan selama mengalami bencana lumpur Lapindo. Pertanyaan dalam wawancara disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan penelitian, yaitu bentuk respon atau dampak psikologis dan sosial yang dialami masyarakat korban, harapannya terhadap penyelesaian masalah psikososial yang dialami selama ini serta jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti partisipan dan bila partisipan tidak memahami apa yang peneliti tanyakan, peneliti mengulangi atau meminta bantuan *key person* untuk menjelaskan maksud peneliti. Begitu pula bila jawaban yang diberikan partisipan belum jelas, atau belum sesuai dengan pertanyaan peneliti, peneliti langsung mengklarifikasi hingga pemahaman peneliti sesuai partisipan.

Materi wawancara mengacu pada daftar atau panduan pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan tujuan khusus penelitian, meliputi perubahan atau dampak psikologis, dampak sosial, harapan terhadap penyelesaian masalah baik yang dilakukan pemerintah maupun PT Lapindo serta kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan masyarakat korban.

Percakapan antara peneliti dan partisipan direkam secara keseluruhan. Durasi wawancara rata-rata sekitar 30-50 menit sudah mencapai saturasi data atau sudah memperoleh data yang diinginkan peneliti dan jawaban partisipan sudah tidak berkembang atau tidak ada lagi yang disampaikan.

Wawancara dilakukan pada jam sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara peneliti dan partisipan. Wawancara biasanya dilakukan pada jam 09.00-17.00 WIB. Wawancara sebagian besar dilakukan di ruang tersendiri yaitu ruang tamu partisipan, dimana hanya ada peneliti dan partisipan saja. *Key person* pernah dua kali mendampingi peneliti pada saat wawancara kepada partisipan pertama dan partisipan ke enam. Hal ini dilakukan karena partisipan pertama sudah tua (berusia 63) sehingga ada kekhawatiran bahasa yang digunakan kurang dimengerti oleh peneliti, sedangkan pada partisipan ke enam karena partisipan ini perempuan. Secara umum wawancara dapat dilakukan dengan lancar.

Anggota masyarakat korban yang dilakukan wawancara sebanyak tujuh orang sebagaimana rekomendasi atau yang ditunjuk oleh *key person* dan dari tujuh orang tersebut, setelah mengisi kuesioner semua partisipan memperoleh skor <60. Pada saat wawancara peneliti juga menggunakan catatan lapangan atau *field note* untuk mencatat kondisi lingkungan dan bahasa non verbal yang ditampilkan partisipan selama wawancara, misalnya intonasi suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suasana lingkungan selama wawancara berlangsung

Jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Jumlah sampel atau partisipan tersebut sesuai pendapat Dukes (1984) dalam Creswell (1998) yaitu antara 6 – 10 partisipan. Pada penelitian tentang dampak psikososial akibat bencana lumpur Lapindo ini saturasi data diperoleh pada partisipan ke tujuh. Saturasi data yang dimaksud adalah situasi dimana informasi yang diberikan oleh partisipan sudah tidak memberikan tambahan informasi baru tentang dampak psikososial

3) Akhir wawancara (terminasi)

Wawancara pada penelitian ini diakhiri dalam kondisi 1) waktu kontrak wawancara sudah habis, 2) tujuan wawancara sudah tercapai, dan 3) jawaban partisipan sudah jenuh (tersaturasi). Proses mengakhiri wawancara dilakukan dengan cara menyimpulkan hasil wawancara dan membuat kontrak untuk melakukan pertemuan atau wawancara lanjutan apabila diperlukan.

3. Tahap Akhir

Tahapan akhir dalam pengumpulan data kepada partisipan ini dilakukan pada saat peneliti melakukan validasi verbatim kata kunci atau pada saat peneliti melakukan *member check* sebagaimana tahapan analisis data yang disampaikan Colaizi (1978, dalam Daymon & Dolloway, 2008). Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2009 di rumah *key person*

Pada tahap ini tidak ada perubahan data baik penambahan maupun pengurangan informasi. Partisipan setuju dan merasa apa yang dirasakan atau dialami sesuai dengan verbatim yang dibuat peneliti, maka proses pengumpulan data selesai. Peneliti mengakhiri pertemuan dengan ungkapan terimakasih kepada partisipan yang telah meluangkan waktu dan dapat bekerjasama dengan baik

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari pengkajian dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan agar hasil temuannya dapat difahami dan di informasikan kepada orang lain (Sugiono, 2007). Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan analisis data dapat dilakukan secara bersamaan (Marshall & Rossman, 1989, dalam Creswell, 2003).

Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, analisa data dilakukan setelah hasil rekaman wawancara ditranskrip kata demi kata dalam bentuk verbatim (Burns dan Grove, 2003, p.380). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 7 (tujuh) langkah - langkah dari Colaizi (1978, dalam Daymon & Dolloway, 2008) sebagai berikut: *Pertama*, membuat transkrip data untuk mengidentifikasi pernyataan – pernyataan yang bermakna dari partisipan. Teknik ini dilakukan sesudah wawancara, peneliti menghimpun berbagai catatan lapangan yang telah dibuat peneliti untuk melengkapi dokumen rekaman. Selanjutnya peneliti segera membuat transkrip verbatim dengan mendengarkan kembali hasil rekaman (*voice record digital*) dan mencocokkan dengan catatan – catatan kecil yang telah dibuat saat wawancara.

Kedua, transkrip yang telah dibuat, dibaca berkali – kali (lebih tiga kali) dan peneliti menfokuskan pada kalimat-kalimat dan frase-frase yang secara langsung terkait dengan masalah yang diteliti untuk dihubungkan dengan tujuan khusus penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga langsung memberikan tanda – tanda khusus atau tulisan–tulisan kecil pada transkrip yang menurut peneliti masih perlu diklarifikasi kepada key person untuk memperjelas pernyataan partisipan. Misalnya pelaksanaan kegiatan keagamaan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini diklarifikasi karena menurut partisipan perempuan kegiatan keagamaan sudah berhenti sedangkan untuk laki-laki masih dilaksanakan meskipun hanya kadang-kadang saja.

Ketiga, merumuskan makna. Langkah ini dilakukan dengan cara mengambil tiap-tiap pernyataan penting atau kata kunci untuk mengungkap maknanya dan

memahaminya sesuai terminologi partisipan. Peneliti merinci makna dari setiap pernyataan penting sesuai konteks aslinya. Hal ini dapat membantu mengungkap makna-makna yang awalnya tersembunyi.

Keempat, mengulangi proses yang sudah dilakukan untuk masing-masing wawancara atau catatan tertulis, kemudian mengelompokkan semua makna yang berbeda itu ke dalam makna tema-tema tertentu atau sub – sub tema.

Kelima, menyediakan uraian analitis yang terperinci menyangkut perasaan-perasaan dan perspektif partisipan yang terdapat dalam tema-tema. Langkah ini oleh Colaizzi disebut sebagai "uraian mendalam atau *exhaustive description*". Pada tahap inilah saatnya peneliti memadukan semua kelompok tema ke dalam sebuah penjelasan yang mengungkap pandangan partisipan terhadap fenomena yang diteliti, atau penentuan tema akhir yang dihubungkan dengan sub – sub tema yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Langkah ini dilakukan dengan cara peneliti menunjukkan transkrip data yang telah dibuat kepada masing-masing partisipan yang dilakukan sekaligus untuk validasi verbatim.

Keenam, merumuskan uraian mendalam menyangkut keseluruhan fenomena yang diteliti, dan mengidentifikasi struktur pokok atau esensi dari bentuk-bentuk yang diteliti (dalam hal ini adalah tema-tema yang teridentifikasi terkait dampak psikososial yang dialami anggota keluarga akibat lumpur Lapindo).

Ketujuh, langkah terakhir adalah *member check* atau membawa kembali hasil temuan-temuan peneliti kepada partisipan berupa lembar transkrip verbatim. Peneliti menanyakan kepada partisipan apakah uraian yang dibuat peneliti sesuai

dengan pengalaman asli partisipan. Pada langkah ini tidak ditemukan perubahan gagasan sehingga proses analisis selesai pada tahap ini.

H. Keabsahan Data

Peneliti menjamin keabsahan (*trustworthiness*) data melalui prinsip validitas dan reliabilitas data yang telah diperoleh. Prinsip uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono (2007) meliputi uji:

Pertama, uji derajat kepercayaan (*credibility*), kriteria ini merupakan makna validitas internal, yaitu cara melakukan pemeriksaan dengan cermat sehingga tingkat kepercayaan temuan dapat dicapai. Teknik yang dapat dilakukan agar penelitian mempunyai derajat kepercayaan tinggi adalah 1) perpanjangan keikutsertaan peneliti, 2) ketekunan pengamatan, 3) triangulasi, 4) pengecekan sejawat atau diskusi tim, 5) kecukupan referensial, 6) kajian kasus negatif, dan 7) pengecekan anggota (Moleong, 2006). Uji derajat kepercayaan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyeleksi partisipan melalui instrumen kuesioner dan wawancara mendalam atau *indepth interview*.

Kedua, uji keteralihan (*transferability*), merupakan validitas eksternal dimana validitas tersebut diasumsikan bahwa penemuan data dapat berlaku pada semua konteks populasi yang sama (generalisasi), berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui sampel yang representatif. Kriteria keteralihan ini dapat dilakukan melalui *transfer* dengan cara menggambarkan tema – tema yang telah teridentifikasi dalam sampel kepada suatu kelompok partisipan yang tidak terlibat

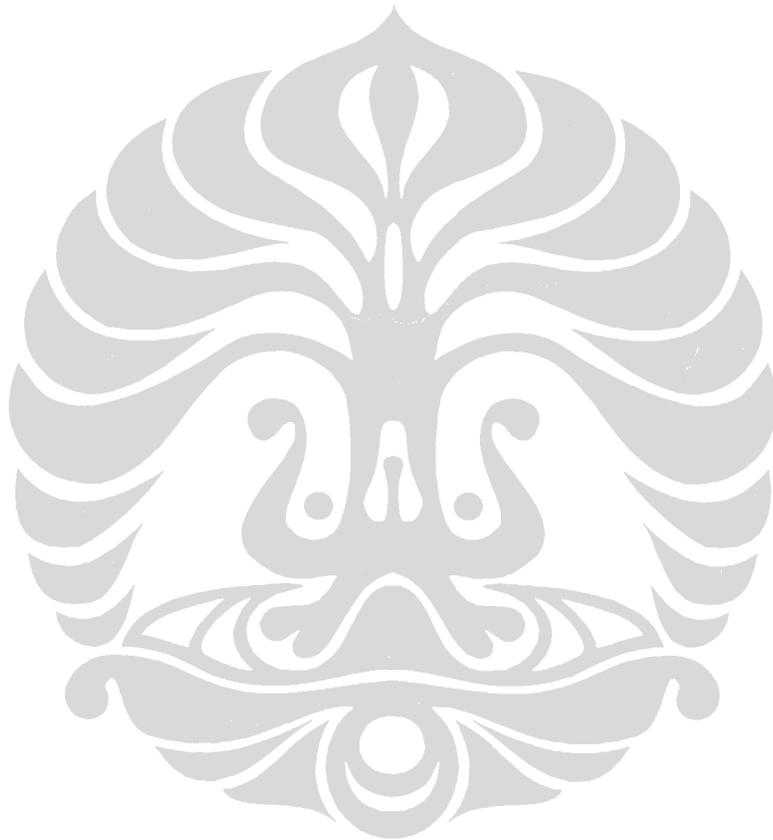
dalam pengumpulan data awal untuk menentukan apakah mereka menyetujui tema – tema tersebut. Dalam penelitian ini belum dilakukan uji keteralihan mengingat batas waktu yang dimiliki oleh peneliti. Sehingga uji keteralihan ini dapat dijadikan saran untuk penelitian selanjutnya

Ketiga, uji kebergantungan (*dependability*), bermakna sebagai reliabilitas, yaitu apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut dengan hasil yang relatif sama. Uji ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh Auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bagaimana peneliti menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan penelitian, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti (Sugiyono, 2007).

Keempat, uji kepastian (*confirmability*), bermakna obyektifitas dalam penelitian kuantitatif. Dalam hal ini obyektifitas hasil penelitian bergantung pada kesepakatan atau persetujuan dari beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan dari penelitian. Tentunya hal ini dilakukan berdasarkan kriteria kepakaran dari subyek yang dikonfirmasi. Untuk mewujudkan kriteria ini, peneliti melibatkan para dosen pembimbing untuk melakukan *review* eksternal.

Menurut Sugiono (2007) Uji *confirmability* ini mirip uji *dependability*, sehingga prosesnya dapat dilakukan bersamaan. Namun uji ini lebih fokus pada hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian. Bila hasil penelitian diperoleh

melalui proses yang benar, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dengan demikian uji *dependability* dan uji *confirmability* telah dilakukan pada saat peneliti menyampaikan seminar hasil, kemudian pembimbing mengaudit aktifitas yang dilakukan peneliti selama proses penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan makna secara psikologis dan sosial (psikososial) dari partisipan sebagai masyarakat korban bencana lumpur Lapindo. Pada bab hasil penelitian ini akan di sajikan dua bagian. Bagian pertama peneliti akan menyajikan uraian tentang karakteristik partisipan, dan bagian kedua peneliti akan menyajikan hasil analisis setiap tema yang muncul dari perspektif partisipan tentang dampak psikososial yang dialami setelah terjadi bencana lumpur Lapindo.

A. KARAKTERISTIK PARTISIPAN

Partisipan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria inklusi. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan. Hasil penilaian berdasarkan kuesioner status kesehatan jiwa yang diberikan kepada masing-masing partisipan diperoleh skor P1=46; P2=52; P3=55; P4=56; P5=41; P6=58; dan P7=56. Berdasarkan hasil skor kuesioner tersebut berarti semua partisipan dalam kondisi status kesehatan jiwa yang buruk atau dibawah rata-rata (≤ 60). Dengan demikian, partisipan memenuhi syarat sebagai partisipan dalam penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan karakteristik masing-masing partisipan.

Partisipan 1: Usia 63 tahun, pendidikan SR (tidak lulus), suku Jawa, beragama Islam, mempunyai tiga anak yang semua sudah berkeluarga. Saat ini partisipan hanya tinggal dengan istrinya karena tiga anaknya sudah tinggal di rumahnya

masing-masing. Sebelum terjadi bencana lumpur Lapindo aktifitas sehari-hari partisipan adalah bertani dan merasa hidupnya kecukupan dari hasil bertani. Setelah terkena bencana lumpur Lapindo partisipan tidak mempunyai pekerjaan karena sawah dan ladangnya sudah terendam lumpur. Partisipan mengaku belum mempunyai tanah atau rumah untuk tempat tinggalnya sendiri sebab uang pembayaran tahap I (20%) digunakan membelikan rumah untuk anak-anaknya, partisipan berencana membuat atau membeli rumah setelah pembayaran uang ganti rugi tahap II sebanyak (80%)

Partisipan 2: Usia 59 tahun, pendidikan SR, suku Jawa, beragama Islam, tidak mempunyai anak. Saat ini partisipan hanya tinggal dengan istrinya. Pekerjaan partisipan sebelum terjadi bencana lumpur Lapindo adalah penjahit yang sudah mempunyai pelanggan tetap, namun setelah adanya bencana lumpur Lapindo partisipan merasa pelanggannya sudah tidak ada karena banyak yang pindah dan umumnya masyarakat juga banyak yang menganggur sehingga orang yang menjahitkan baju atau pakaian juga jarang/sepi. Partisipan mengaku sudah membeli tanah untuk tempat tinggal selanjutnya sedangkan untuk membangun menunggu pembayaran ganti rugi tahap II

Partisipan 3: Usia 47 tahun, pendidikan SMP, suku Jawa, beragama Islam, mempunyai tiga anak, paling besar SMA kelas satu dan yang paling kecil sekolah 3 SD. Partisipan tinggal dengan Istri dan anak-anaknya. Sebelum terjadinya bencana lumpur Lapindo partisipan mempunyai usaha arisan mebel, namun setelah ada bencana usaha yang dirintis berhenti. Aktifitas keseharian partisipan saat ini hanya membantu istri berjualan barang-barang keperluan sehari-hari

dirumahnya. Aktifitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tetangga yang hanya tinggal beberapa orang saja. Partisipan mengaku sudah membeli tanah untuk tempat tinggal selanjutnya sedangkan untuk membangun menunggu pembayaran ganti rugi tahap II

Partisipan 4: Usia 38 tahun, pendidikan SMA, suku Jawa, beragama Islam, mempunyai 2 anak, keduanya masih Sekolah Dasar (SD) yaitu kelas 3 dan kelas 5 SD. Partisipan tinggal serumah dengan istri dan anak-anaknya. Saat ini partisipan masih bekerja sebagai petugas keamanan (SATPAM) di perusahaan Sepatu yang terletak di kecamatan Buduran Sidoarjo (Kecamatan perbatasan dengan kota Surabaya). Partisipan mengaku sudah membeli rumah namun baru memberi uang muka saja karena sisanya menunggu pembayaran tahap II.

Partisipan 5: Usia 46 tahun, pendidikan SR, suku Jawa, beragama, Islam, mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama berhenti sekolah dari kelas satu STM/SMK karena tidak ada biaya sedangkan adiknya kelas 1 SMP dan kelas 4 SD. Saat ini Partisipan tinggal satu rumah dengan Istri, anak-anak dan mertua. Sebelum terjadinya bencana lumpur Lapindo, partisipan bekerja sebagai buruh bangunan, namun setelah adanya bencana partisipan lebih banyak menganggur. Partisipan mengaku sudah membeli tanah sedangkan untuk membangun direncanakan menunggu pembayaran tahap II.

Partisipan 6: Usia 30 tahun, pendidikan SMA, suku Jawa, beragama, Islam, mempunyai 2 orang anak yang masih duduk dibangku SD. Saat ini partisipan tinggal bersama anak dan suaminya. Sebelum terjadi bencana, partisipan tinggal

satu rumah dengan orang tuanya (Ibu) dan adik-adiknya. Setelah terjadi bencana dan mendapat uang ganti rugi pembayaran tahap 1 (20%), Ibu partisipan memilih tinggal dengan adiknya di rumah kontrakan yang berada di luar area terdampak. Pekerjaan partisipan sebelum bencana adalah berdagang di pasar Porong Baru, namun setelah adanya bencana usaha partisipan berhenti. Sedangkan suaminya bekerja sebagai penjaga tambak di Japanan (berada di sebelah barat kecamatan Jobon). Partisipan mengaku belum membeli tanah dan berencana akan langsung beli rumah setelah ganti rugi tahap II dibayarkan.

Partisipan 7: Usia 34 tahun, pendidikan SMP, suku Jawa, beragama, Islam, mempunyai 3 orang anak yang masih balita. Saat ini partisipan tinggal sendirian dirumah karena anak dan Istrinya tinggal di Jawa Tengah semenjak ada bencana lumpur Lapindo untuk menghindari udara yang tidak sehat dan meminimalkan pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari. Aktifitas sebelum adanya bencana adalah loper (mengantarkan) telur. Setelah terjadi bencana, partisipan tidak mempunyai pekerjaan karena pelanggan yang di Perumtas sudah tidak ada lagi. Partisipan mengaku belum beli tanah maupun rumah untuk tinggal selanjutnya. Partisipan berencana akan langsung beli rumah apabila sisa ganti rugi tahap kedua dibayarkan.

B. ANALISIS TEMA

Analisis tema dilakukan setelah data yang dikumpulkan melalui *indepth interview* dan *field note* dibuat transkrip verbatim. Analisis tema menggunakan langkah-langkah yang dikembangkan oleh Collaizi (1978, dalam Holloway & Daymon 2008). Dari analisis tersebut kemudian diidentifikasi tema-tema yang

mengacu pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini ditemukan sembilan tema inti dan dua tema tambahan. Tema inti berorientasi pada tujuan khusus penelitian. Pada tujuan khusus pertama tentang dampak psikologis, ditemukan tiga tema yaitu:

Tema 1: Perubahan emosi

Tema 2: Perubahan kognitif

Tema 3: Mekanisme koping

Sementara tujuan khusus kedua mengenai dampak sosial juga ditemukan tiga tema yaitu:

Tema 4: Perubahan fungsi keluarga

Tema 5: Perubahan hubungan sosial kemasyarakatan

Tema 6: Dukungan social

Pada tujuan khusus ketiga mengenai harapan penyelesaian masalah ditemukan satu tema yaitu:

Tema 7: Harapan penyelesaian masalah kepada pemerintah maupun PT Lapindo.

Sedangkan tujuan khusus keempat tentang kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban ditemukan dua tema yaitu:

Tema 8: Kebutuhan pelayanan kesehatan fisik

Tema 9: Kebutuhan pelayanan kesehatan psikososial

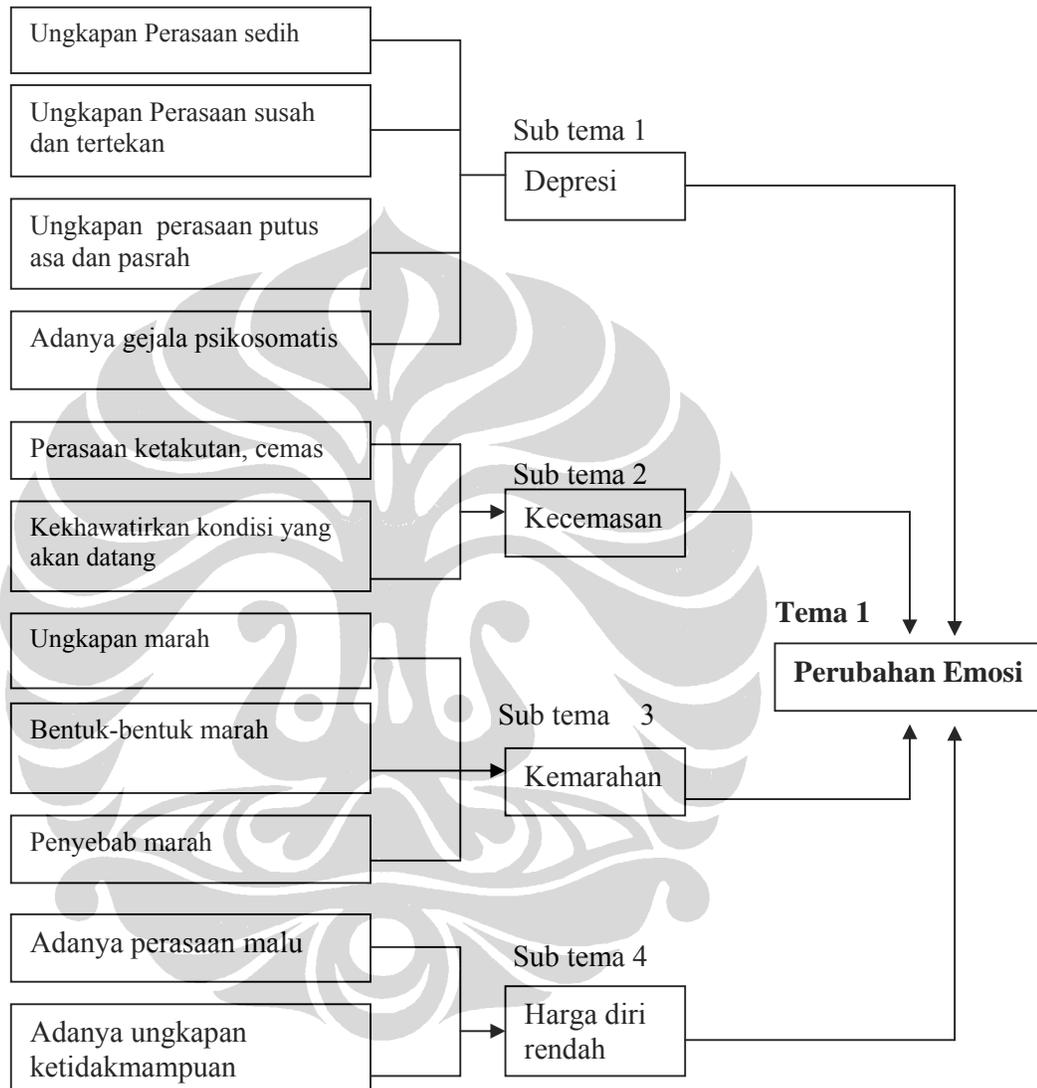
Disamping sembilan tema inti yang mengacu pada tujuan khusus, dalam penelitian ini juga ditemukan dua tema tambahan yaitu

Tema tambahan 1: Resiko dan gangguan perkembangan

Tema tambahan 2: Distress spiritual

Berikut ini dijelaskan proses analisis data dengan menggunakan skema analisis pada setiap tema yang ditemukan:

Skema 1, tema 1: Perubahan emosi



a. Depresi

Semua partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan adanya depresi. Pernyataan depresi dinyatakan dalam bentuk keluhan psikologis dan somatis. Keluhan psikologis diungkapkan dalam pernyataan partisipan seperti perasaan sedih, susah, putus asa, dan pasrah. Sedangkan keluhan somatis antara lain

ungkapan tidak bisa tidur, tidak nafsu makan dan kepala pusing. Keluhan psikologis seperti pernyataan sedih diungkapkan oleh empat partisipan. Perasaan sedih ini disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain karena terpisah dengan anggota keluarga atau hilangnya mata pencaharian, namun secara umum perasaan sedih partisipan disebabkan belum mampu membeli atau membuat rumah sebagai tempat tinggal baru, disamping itu partisipan juga memikirkan nasibnya setelah menempati tempat tinggal baru. Hal ini dikarenakan partisipan tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah adanya bencana lumpur Lapindo.

Perasaan susah disampaikan oleh lima partisipan. Perasaan ini disebabkan karena uang sisa ganti rugi tahap II yang dijanjikan belum juga dibayar. Padahal setelah kejadian bencana, partisipan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan, sedangkan kebutuhan hidup terus berlangsung. Kesedihan ini diperparah dengan tidak adanya kepastian waktu pembayaran sisa ganti rugi tahap II.

Satu partisipan mengungkapkan rasa putus asa dan dua partisipan menyatakan pasrah terhadap keadaan yang dialami. Putus asa dan pasrah akan kondisi yang dialami masyarakat ini dikarenakan karena kenyataannya bencana lumpur Lapindo hingga hampir tiga tahun belum bisa dihentikan meskipun berbagai upaya sudah dilakukan. Masyarakat dapat menerima kenyataan yang dialami saat ini dan pasrah kepada kebijakan pemerintah terhadap masyarakat korban sebagaimana ungkapan partisipan dibawah ini:

”karena ini sudah bencana ya gimana lagi kita terima apa adanya.... kita pasrah saja masak pemerintah membiarkan warganya seperti ini terus....P2)”

Selain perasaan depresi secara psikologis, pernyataan depresi juga dijelaskan dengan adanya keluhan secara somatis, misalnya adanya keluhan tidak bisa tidur yang dialami oleh enam partisipan. Sementara hanya ada satu partisipan yang mengeluh kepala pusing, tidak bisa makan (Peneliti: tidak nafsu makan) dan kepala uantep (terasa berat) sebagaimana ungkapan partisipan berikut ini:

” Perubahannya ya ndak bisa tidur, ndak bisa makan, dan kepala saya ini pusing sekali mas. Katanya orang-orang darah tinggi, katanya darah rendah tapi kepala saya ini *uaantep* (berat) mas....(P1)”

b. Kecemasan

Tujuh partisipan mengalami perasaan cemas dan khawatir dengan penyebab yang berbeda. Partisipan yang mendapatkan uang ganti rugi tahap I tidak terlalu banyak, perasaan cemas dan khawatir muncul karena belum mampu membeli atau membuat rumah ditempat yang baru. Sementara bagi partisipan yang mempunyai pengalaman masuknya lumpur Lapindo pada saat mereka tertidur lelap, mereka khawatir karena tanggulnya jebol sehingga lumpur masuk ke rumah-rumah mereka lagi, sementara partisipan lainnya cemas dan khawatir terhadap kehidupan ditempat yang baru nanti, terutama masalah pekerjaan, sebagaimana ungkapan partisipan dibawah ini:

“ditempat baru nanti bekerja apa?.... apa bisa saya bertahan hidup karena nggak ada kerjaan....(P5)

c. Kemarahan

Ungkapan marah ini dikemukakan oleh empat partisipan. Dua partisipan yang mengaku belum membeli tanah atau rumah baru menyatakan bahwa

kemarahnya disebabkan pembayaran sisa ganti rugi tahap II hingga kini belum terlaksana bahkan terkesan diundur terus:

”katanya awal tahun 2009 sudah dibayar dan harus pindah, mundur lagi katanya bulan April dan nyatanya hingga sekarang belum ada pembayaran tahap II, jengkel saya molor terus.... (P1)”.

Partisipan lainnya mengungkapkan kemarahannya disebabkan merasa dipingpong (saling melempar tanggung jawab ketika warga meminta tanggung jawab dari PT Lapindo maupun Pemerintah) dan merasa diadu domba dengan pihak aparat. Manifestasi perasaan marah dari masing-masing partisipan berbeda, ada yang hanya sekedar mencaci maki dalam hati, ada yang merasa mudah emosi dan sensitif kepada keluarganya namun juga ada yang secara langsung melampiaskan kemarahannya dengan kata-kata kotor, misalnya ungkapan berikut ini:

“memang Lapindo ini kurang ajar....(P1)”

“*mbokne ancuk Lapindo, usir aja Lapindo...(P3)*

Selain ungkapan kemarahan kepada PT Lapindo, ada satu partisipan yang berprofesi sebagai penjahit dan tidak mempunyai anak ini mengungkapkan kemarahan kepada sesama anggota warga masyarakat yang sudah pindah rumah namun tidak ada pemberitahuan kepada warga atau Pak RT setempat, hal ini dianggap sikap yang kurang kompak untuk menuntut pencairan sisa ganti rugi tahap II yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Kemarahan partisipan ini dinyatakan dalam bentuk ungkapan berikut ini:

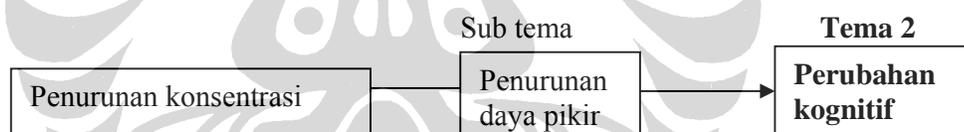
“Mestinya harus selalu kerjasama,...jangan meninggalkan yang disini dulu, nanti kalau sudah lunas minggat-minggato (peneliti: bahasa jawa kasar yang artinya silahkan keluar/pindah). (*field note: ekspresi tegang, suara keras, intonasi meningkat*)

d. Harga diri rendah

Sub tema ini hanya diungkapkan oleh satu partisipan yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan hanya hidup bersama istri, semua anaknya sudah berkeluarga dan hidup terpisah dengan partisipan. Partisipan mengaku belum membeli tanah atau rumah karena uang ganti tahap I sudah dibuat untuk membeli rumah bagi ketiga anaknya. Ungkapan yang menjelaskan adanya harga diri rendah adalah perasaan malu. Perasaan malu ini muncul ketika partisipan merasa tidak mempunyai apa-apa dan tidak ada yang bisa disuguhkan ketika ada tamu atau orang lain yang berkunjung ke rumahnya, seperti yang disampaikan oleh partisipan berikut ini:

”malu mas dirumah tidak ada apa-apa....nol saya mas ndak punya apa-apa....(P1)

Skema 2, tema 2: Perubahan kognitif



a. Penurunan daya fikir

Jumlah partisipan yang mengindikasikan telah terjadi penurunan daya pikir ada tiga orang. Bentuk penurunan daya fikir yang dimaksud adalah fikiran yang tidak *karu-karuan* (peneliti: fikiran kacau, tidak fokus, dan terpecah-pecah). Fikiran ini terjadi karena masalah uang ganti rugi, baik yang sudah dibayarkan tahap I maupun belum dibayarkannya sisa ganti rugi tahap II.

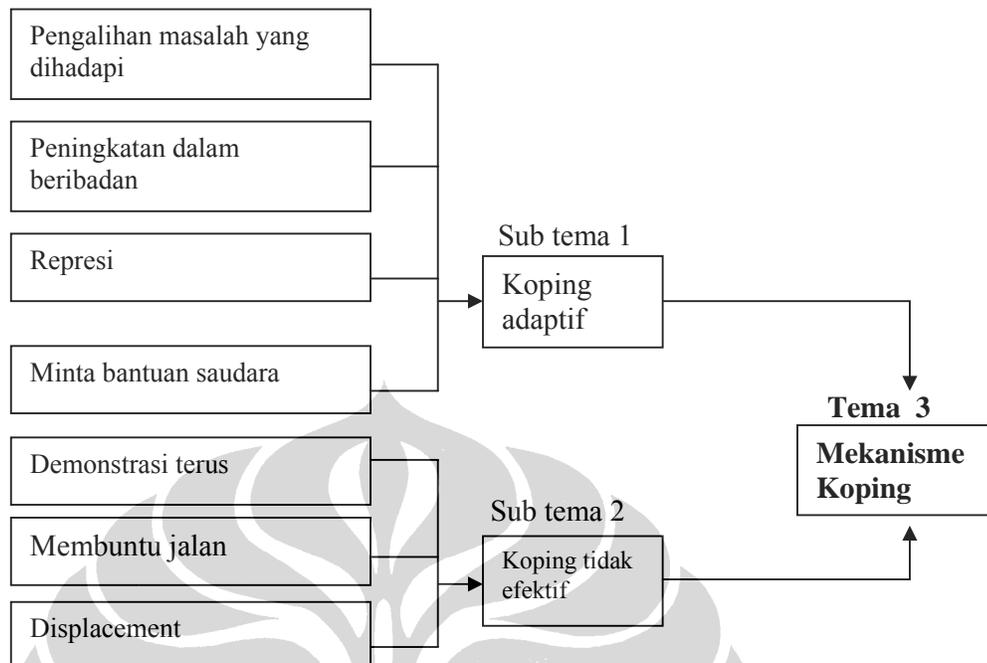
Menurunnya daya fikir akibat turunnya ganti rugi tahap I diungkapkan oleh dua partisipan. Satu partisipan yang sudah memberi uang muka kepada pemilik rumah yang akan dibeli, mengakui bahwa uang yang diterima pada tahap I

tidak cukup untuk beli rumah baru, karena uang tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak ada penghasilan lain. Partisipan lain mengaku bahwa uang ganti rugi tahap I yang sudah diterima menimbulkan masalah dalam keluarga. Masalah tersebut terkait dengan pembagian dengan penggunaan uang yang sudah mereka terima.

Menurut salah satu partisipan, terdapat perbedaan pendapat diantara warga masyarakat tentang penggunaan uang ganti rugi tahap I. Ada yang menyatakan sebaiknya uang tersebut dibelikan rumah secukupnya, meskipun kecil yang penting sudah punya rumah. Adapula yang berpendapat lebih baik uang tersebut digunakan untuk membeli tanah terlebih dahulu, jika ganti rugi tahap II dibayar baru membangun rumah. Sehingga, menurut partisipan, perbedaan pendapat tersebut sering menimbulkan konflik keluarga. Disamping itu partisipan juga menyatakan bahwa jarak waktu pembayaran tahap I dan tahap II terlalu lama dan tidak jelas menimbulkan perubahan emosi dan fikiran dari warga masyarakat korban. Partisipan mengaku menjadi ragu dengan masa depannya dan tidak bisa berfikir jernih seperti sebelumnya. Satu orang partisipan lain yang masih bekerja sebagai SATPAM ini mengungkapkan pendapatnya secara terbuka sebagai berikut:

“jadi pikirannya ya nggak karu-karuan.....malah menimbulkan pikiran kacau..... nggak bisa berfikir jernih..... ragu ragu..... peikiran terpecah-pecah.....setelah mendapatkan uang 20% saya kebingungan.... (P4)”

Skema 3, tema 3: Mekanisme koping



a. Koping adaptif

Hampir semua partisipan pada penelitian ini menggunakan mekanisme koping yang adaptif, meskipun jenis koping yang digunakan masing-masing partisipan berbeda. Dua partisipan menghadapi masalah atau stressor dengan mengalihkan perhatiannya dengan cara ngobrol, bermain domino dengan tetangga, ngopi diwarung dan sebagainya. Sedangkan dua partisipan lain yang setiap harinya dirumah dan merasa mempunyai banyak waktu luang menggunakan cara meningkatkan ibadah, mengaji dirumah, rajin dimasjid dan berdo'a agar musibah yang dialami segera berakhir. Selain itu ada juga partisipan yang mengaku meminta bantuan kepada saudaranya untuk menghadapi kondisi yang dihadapi saat ini, disisi lain ada partisipan yang mensikapi masalah tersebut dengan diam dan menyimpannya dalam hati seperti pernyataan berikut ini:

“kalau kepikiran seperti itu paling saya diam, duduk, angan-angan.... kalau ada masalah paling saya simpan dalam hati (P2)”

b. Koping tidak efektif

Satu partisipan mengungkapkan akan melakukan demonstrasi terus (unjuk rasa) dan membuntu jalan (menutup jalan), apabila hak yang mereka tunggu (pembayaran sisa ganti rugi tahap II) belum juga diberikan. Partisipan ini menjelaskan bahwa, meskipun saat ini sebagian warga sudah pindah rumah, namun jika mereka mendapatkan informasi tentang aksi unjuk rasa atau adanya masalah di desa mereka pasti kompak datang untuk membantu warga yang masih tinggal disini (belum pindah).

Ungkapan partisipan untuk melakukan demonstrasi dan membuntu jalan agar pihak proyek tidak dapat membangun tanggul hingga tuntutan mereka terpenuhi adalah sebagai berikut:

“Ya demo terus....membuntu jalan atau melarang pihak proyek membangun tanggul disini...(P3)”

Satu partisipan lain mengatakan bahwa akibat bencana lumpur Lapindo ini merasa mudah marah dan emosi, sehingga anak dan istrinya menjadi sasaran.

Skema 4, tema 4: Perubahan fungsi keluarga



a. Perubahan fungsi sosial keluarga

Perubahan fungsi sosial keluarga menyebabkan renggangnya ikatan atau hubungan kekeluargaan. Satu partisipan yang mempunyai tiga anak, yang saat ini hanya tinggal dengan istrinya mengungkapkan renggangnya ikatan kekeluargaan terjadi karena hidupnya terpisah dengan anak-anaknya yang sebelumnya hidup bersama dalam satu desa dan berdekatan. Satu partisipan lain mengatakan bahwa renggangnya kekeluargaan ini karena terpisah dengan orang tua dan saudaranya karena sebelumnya partisipan ini hidup bersama dalam satu rumah.

Disisi lain ada partisipan menjelaskan bahwa merenggangnya hubungan kekeluargaan sebagai bentuk berubahnya fungsi sosial keluarga ini disebabkan karena adanya konflik antar anggota keluarga setelah pencairan dana ganti rugi tahap I. Umumnya, penyebab konflik adalah pembagian uang yang belum adil kepada sesama saudara, sebagaimana ungkapan partisipan berikut ini:

“persaudaraan cekcok terus, hubungan antar keluarga banyak yang renggang, antar saudara kandung aja banyak yang renggang, dulu sesama saudara tenang-tenang saja, rukun tapi sekarang tidak bicara, geheran (P3)”

“dulunya adem ayam tentrem, terus dapat uang malah gak karuan, masalahnya individu kan macem-macem, maunya begini, begitu, jadinya orang tua bingung, malah bermasalah. Kalau dulu kan nggak pernah karena nggak ada yang jadi rebutan (P5)”

b. Perubahan fungsi ekonomi keluarga

Sebanyak lima partisipan mengutarakan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru sejak terjadinya bencana lumpur Lapindo. Berbagai usaha dan pekerjaan yang selama ini mereka lakukan berhenti atau hilang. Ada yang dulunya bekerja sebagai petani harus berhenti karena lahan sawah dan ladangnya tertimbun lumpur. Masyarakat yang dulunya berprofesi sebagai penjahit juga berhenti

karena tidak ada konsumen. Sedangkan masyarakat yang dulu berwiraswasta atau menjalankan usaha sendiri seperti mebel, menjual buah-buahan di pasar, serta pedagang telur, juga berhenti aktivitasnya karena pembeli atau konsumennya tidak ada. Begitu pula yang dulu sebagai tenaga bangunan juga berhenti karena tidak ada lagi yang membangun rumah di wilayahnya. Hampir semua pekerjaan sebagai mata pencaharian utama masyarakat berhenti sehingga aktifitas keseharian mereka saat ini lebih banyak menganggur atau tanpa pekerjaan, seperti pernyataan partisipan sebagai berikut:

“sekarang nganggur, tidak ada pekerjaan...(P1)”

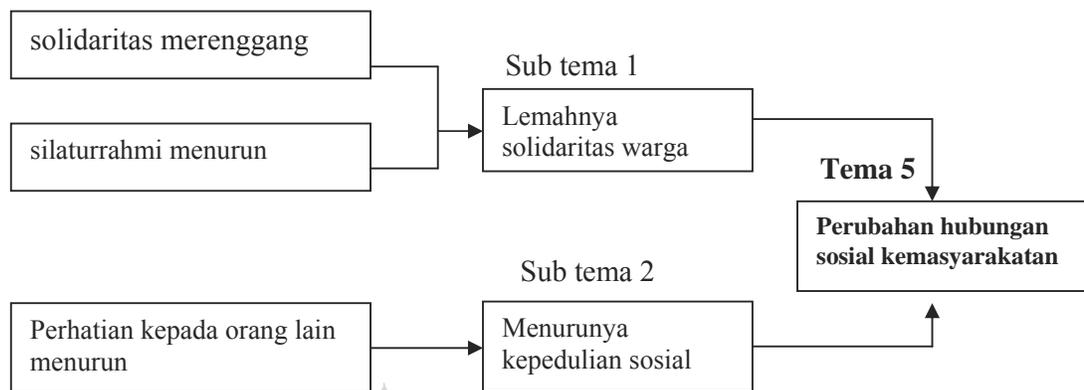
“dulunya mudah dan lancar sekarang hilang, pekerjaan jadi mati seketika...(P3)”

Kondisi diatas mempengaruhi fungsi keluarga yang lain yaitu memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal baru bagi keluarga dan kebutuhan memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka. Cita-cita untuk menyekolahkan anak setinggi-tingginya harus berhenti dulu karena ketidakmampuan membayar biaya sekolah seperti pernyataan partisipan berikut ini:

“Sekarang aja anak saya berhenti sekolah karena nggak bisa bayar SPP sehingga nggak bisa ikut ujian, jangankan uang 200 atau 100 ribu, 10 ribu aja nggak punya mas, susah mas. Dulu saya cita-cita saya kerja bangunan nggak papa kalau bisa anak laki-laki satu-satunya bisa sekolah SMA atau kalau mungkin sampai kuliah, eh ternyata baru kelas satu SMA saja sudah nggak bisa...(P5)”

Sementara untuk kebutuhan tempat tinggal akan diupayakan terpenuhi apabila sisa ganti rugi tahap II (80%) sudah dibayarkan

Skema 5, tema 5: Perubahan hubungan sosial kemasyarakatan



a. Lemahnya solidaritas warga

Bencana lumpur Lapindo membawa perubahan pada hubungan sosial yang ada di masyarakat. Semua partisipan mengakui adanya perubahan yang terjadi yaitu renggangnya hubungan antar warga. Hal ini disebabkan warga yang sudah mampu membeli rumah ditempat lain, pindah tanpa memberitahu ketua RT atau ijin kepada warga lainnya, sementara setelah pindah mereka jarang mengunjungi rumah mereka yang masih ada di desa Pajarakan sehingga warga menilai hubungan mereka tidak seperti dulu lagi.

Hal seperti ini di sayangkan oleh dua partisipan yang menginginkan tetap adanya kekompakan antar warga. Partisipan ini mengingatkan bahwa ketika memperjuangkan ganti rugi mereka bersama-sama, namun setelah mendapatkan uang ganti rugi, mereka pergi atau pindah rumah tanpa memberitahu atau memedulikan kondisi warga lain yang masih tinggal di desa Pajarkan. Namun demikian ada partisipan yang menilai lain, bahwa warga yang pindah masih mempunyai solidaritas dengan warga yang lain karena meskipun sudah tidak tinggal disini apabila diberi kabar ada masalah atau

tekanan dari Proyek (PT. Lapindo) mereka masih datang untuk memberi dukungan, sebagaimana pernyataan partisipan berikut ini:

“kalau ada tekanan dari proyek mereka masih kompak datang lagi kesini....(P3)”

b. Menurunnya kepedulian sosial

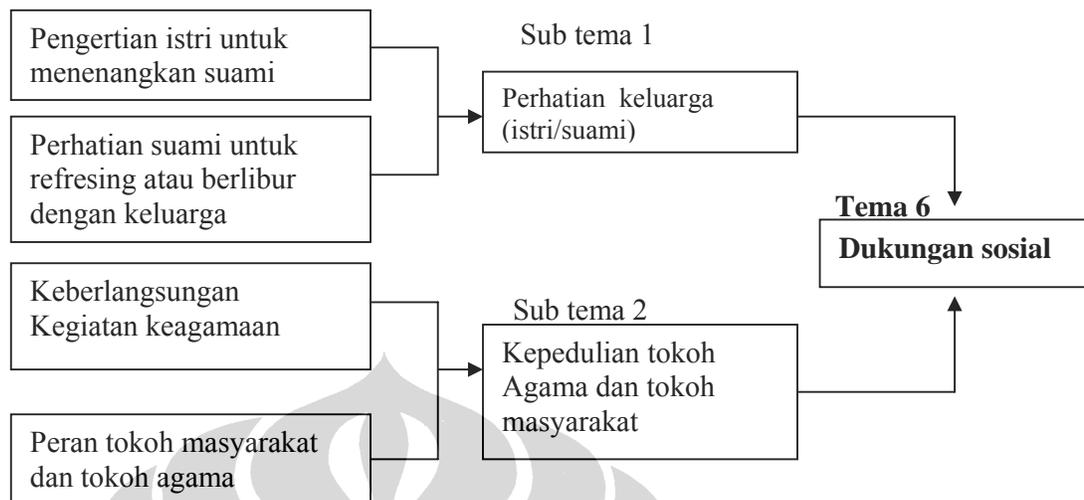
Dua partisipan yang mengaku belum punya rumah di tempat baru dan saat ini tidak mempunyai pekerjaan berpendapat bahwa mayoritas warga desa Pajarakan ini hanya terfokus pada realisasi waktu pembayaran sisa ganti rugi tahap II tersebut dilaksanakan. Masyarakat menaruh harapan agar pembayaran ganti rugi tahap II segera dilaksanakan. Belum terealisasinya ganti rugi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami banyak perubahan, diantaranya perubahan dalam berinteraksi dan rendahnya kepeduliaanya dengan tetangga atau orang lain.

Partisipan juga mengakui setelah ada bencana ini, sebagian warga kurang atau tidak peduli lagi kepada orang lain. Mereka seakan-akan memikirkan hidupnya sendiri-sendiri dan cuek dengan lingkungan yang terjadi. Kekompakan dan sikap saling membantu yang dulu mereka lakukan sekarang ini sudah berubah sebagaimana pernyataan partisipan dibawah ini:

“kalau dulu kompak mas, sekarang sudah berubah semua... urusan hidup sehari-hari sepertinya kurang peduli, cuek tidak seperti dulu saling membantu...(P3)”

“sekarang sudah mikir hatinya sendiri nggak mikir urusan orang lain....(P5)”

Skema 6, tema 6: Dukungan sosial



a. Perhatian keluarga (istri/suami)

Satu partisipan mengaku mudah marah dan emosi akibat uang ganti rugi tahap II belum dibayarkan, padahal uang tersebut yang menjadi jaminan untuk melunasi kekurangan beli rumah baru, sementara orang yang punya rumah terus menagih sehingga partisipan tersebut mengaku mudah marah dan emosi. Partisipan yang mengaku masih bekerja sebagai SATPAM disalah satu perusahaan yang jauh dari tempat tinggalnya ini bersyukur karena mempunyai istri yang sangat pengertian.

Partisipan ini mengaku selalu ditenangkan oleh istrinya bahwa rumah yang ada saat ini masih bisa ditempati sehingga tidak harus memaksa pindah rumah karena memang uang ganti rugi tahap II belum dibayar. Hal senada juga dialami oleh partisipan lainnya. Partisipan yang memindahkan Istri dan anak-anaknya ke kampung Jawa Tengah ini mengaku istrinya sangat memahami kondisinya sekarang. Meskipun hanya membawa uang sedikit istrinya tidak pernah marah karena memang setelah bencana lumpur ini

semua pekerjaan yang dulu digeluti berhenti, bahkan saat ini istrinya rela dipulangkan ke kampung agar dapat merawat anak-anaknya dengan baik dan kebutuhan hidup sehari-hari bisa tercukupi.

Sementara itu ada partisipan yang mengungkapkan perhatian suaminya diwujudkan dengan cara sering telpon menanyakan kondisi keluarga dan kalau malam minggu mengajak jalan-jalan bersama anak-anak sehingga mereka merasa terhibur, seperti ungkapan partisipan berikut ini:

”pulanginya lebih sering, terus kalau ndak pulang telpon tanya keadaan anak-anak, sering menghibur kalau malam minggu saya dan anak anak diajak jalan-jalan ke Sidoarjo (kota Kabupaten)...(P6)”

Namun demikian ada pula partisipan yang mengaku kurang mendapat dukungan dari keluarga bahkan tekanan karena belum bisa membangun rumah apabila harus pindah ditempat baru nanti, seperti ungkapan partisipan dibawah ini:

”saya sering marah, karena anak sering minta sama orang tua tapi ndak melihat kondisi orang tua...., kok kita belum punya rumah nanti kita bagaimana... tahu tahunya menekan sehingga saya sering emosi...(P5)”

b. Kepedulian tokoh Agama dan tokoh masyarakat

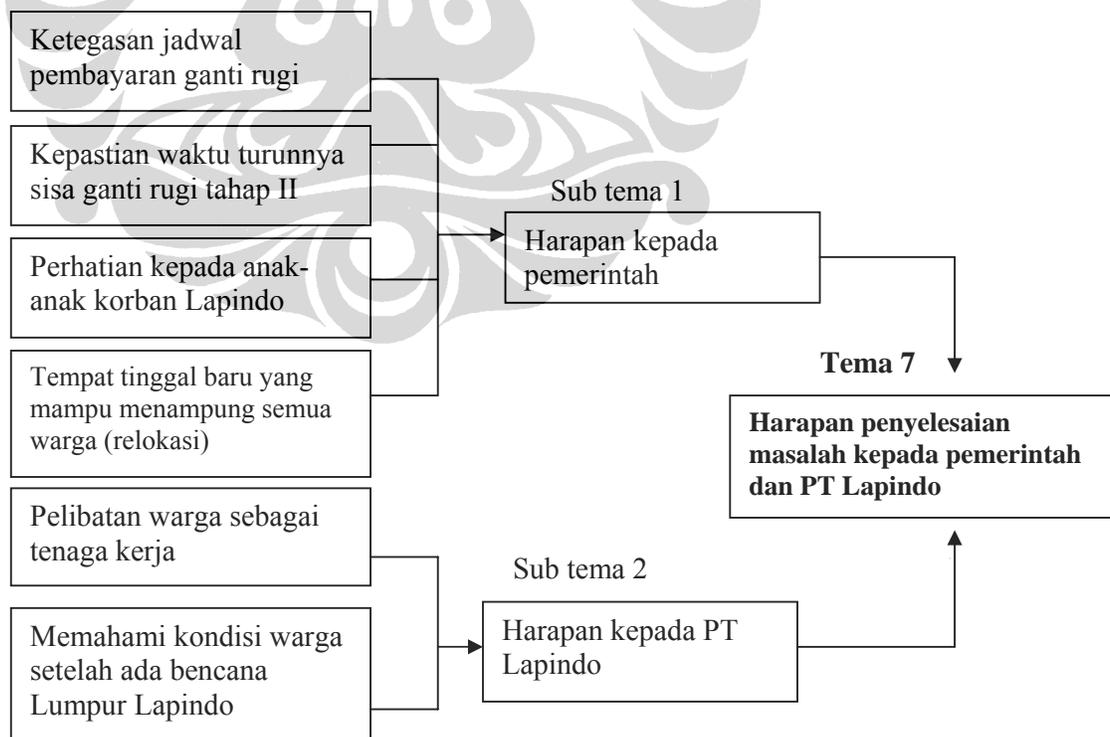
Dua partisipan mengungkapkan peran serta tokoh masyarakat maupun tokoh agama sangat dirasakan oleh warga dalam memberikan dukungan selama musibah terjadi. Satu partisipan menceritakan bahwa ketika warga lepas kendali, emosi yang berlebihan maka pak RW mampu menenangkan dan menyadarkan bahwa tindakan tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Pak RW mengajak kepada warga agar dapat menghadapi masalah

ini dengan tenang dan pikiran yang jernih tanpa harus emosi atau bertindak kasar yang tidak ada gunanya.

Sementara itu, satu partisipan lainnya menjelaskan peran pak Modin sebagai tokoh agama yang ada di desa Pajarakan sangat besar dalam menenangkan dan menyadarkan masyarakat korban bencana lumpur Lapindo ini melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya Tahlillan atau memberikan nasehat untuk bisa sabar dalam menghadapi ketentuan Allah SWT. Peran pak RW dan pak Modin dalam memberikan dukungan bagi warga diungkapkan partisipan berikut ini:

“kalau sedang emosi, pak RW dan pak Modin mendatangi dan menyadarkan kami sehingga emosi kami menurun...(P3)”

Skema 7, tema 7: Harapan penyelesaian masalah



a. Harapan kepada pemerintah

Semua partisipan menganggap bahwa solusi yang paling utama dalam penyelesaian masalah lumpur Lapindo saat ini bagi masyarakat korban adalah pembayaran sisa ganti rugi tahap II. Salah satu partisipan bahkan menuntut sikap tegas dari pemerintah agar sisa ganti tahap II yang sudah dijanjikan dapat segera dibayarkan. Selain itu perlu ada kepastian waktu pembayaran tahap II tersebut dilaksanakan, karena ketidakpastian waktu pembayaran/pelunasan seperti sekarang ini masyarakat semakin menderita.

Penderitaan ini diungkapkan oleh salah satu partisipan yang merasa jarak waktu pencairan dana tahap I dan tahap II cukup lama, sehingga alokasi biaya untuk hidup sehari-hari membengkak sedangkan pemasukan tidak ada, pekerjaan juga tidak ada. Dipihak lain, warga yang sudah memberi uang muka dalam pembelian rumah juga dikejar-kejar atau ditagih oleh yang mempunyai rumah, hal ini semakin membuat masyarakat korban tidak tenang dan kacau karena tidak ada waktu yang pasti kapan sisa ganti rugi tahap II tersebut diberikan.

Harapan lain yang diungkapkan salah satu partisipan yang mempunyai dua anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) adalah perhatian pemerintah kepada anak-anak yang menjadi korban lumpur Lapindo. Menurut Partisipan ini, berbagai perubahan pada anak sudah mulai tampak, namun tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut belum ada. Kalaupun sudah pernah ada dari LSM itupun sifatnya sementara pada awal-awal terjadinya bencana, setelah itu tidak ada lagi kegiatan atau intervensi untuk mengantisipasi masalah yang terjadi pada anak-anak.

Partisipan berharap perhatian yang serius dan tindakan yang kontinyu dari pemerintah kepada anak-anak agar emosinya terjaga. Selama ini partisipan menganggap kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak-anak korban, termasuk tidak adanya perhatian dari Komisi Nasional Perlindungan Anak pimpinan Kak Seto, sebagaimana pernyataan partisipan berikut ini:

“paling tidak ada perhatian dari pemerintah terhadap nasib anak-anak kami yang ada di sini. Tapi ternyata selama ini nggak pernah ada perhatian dari pemerintah, mas sendiri tahu apakah kak Seto sebagai Komnas Anak pernah ke masyarakat korban lumpur kan nggak pernah. Jadi harapan saya paling tidak ada perhatianlah. Misalnya penyuluhan atau kegiatan-kegiatan yang khusus untu anak-anak (P4)”

Disisi lain, partisipan menyampaikan harapannya mengenai tempat tinggal baru atau relokasi untuk warga satu desa agar hubungan antar tetangga dan lingkungan tetap terjaga, rukun dan kompak sebagaimana ditempat asal, sebagaimana pernytaan partisipan berikut ini:

“mestinya yang difikirkan pemerintah tidak hanya sekedar rumah dan tanah kami dibeli tapi bagaimana lingkungan kami nanti.... mudah-mudahan lingkungan ditempat baru saya nanti orang-orangnya juga rukun, kompak (P3)”

b. Harapan kepada PT Lapindo

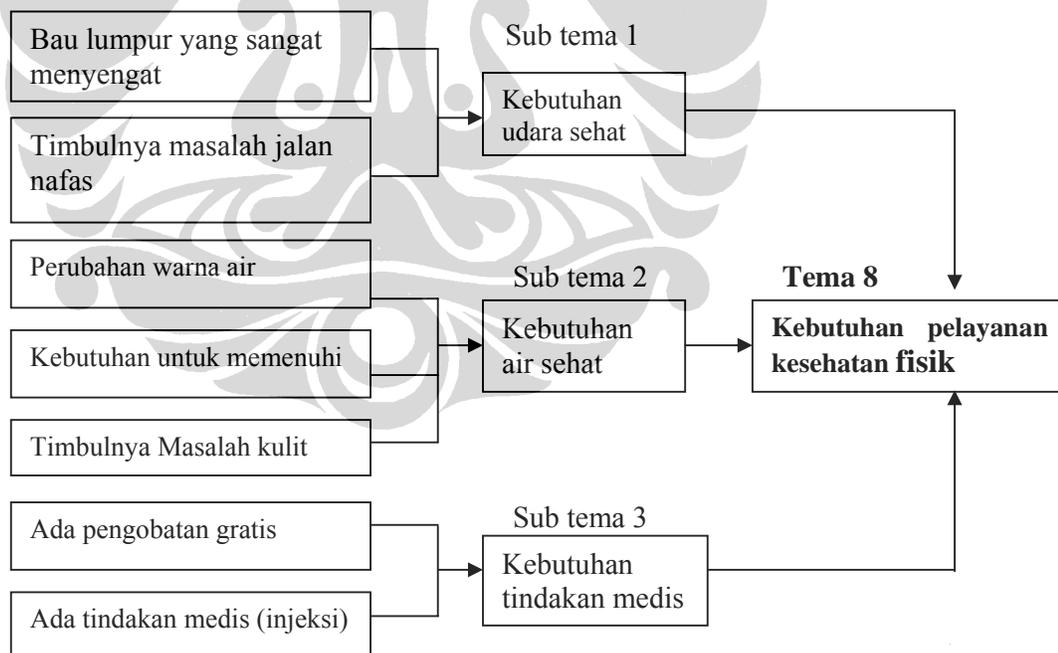
Semua partisipan berharap kepada PT Lapindo, agar nasib mereka setelah menjadi korban bencana lumpur Lapindo ini diperhatikan. Salah satu bentuk perhatian yang bisa dilakukan sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu partisipan adalah melibatkan warga sebagai tenaga kerja dalam proyek pembangunan tanggul untuk membendung luapan lumpur. Harapan partisipan ini diungkapkan sebagaimana pernyataan dibawah ini:

“mestinya kan bisa diajak kerja proyek,.... waktu nanggul itu kan bisa kita diajak biar sedikit-dikit ada pemasukan....(P3)”

Hal tersebut diungkapkan partisipan karena warga merasa bahwa kondisinya sekarang pengangguran atau hilangnya mata pencaharian mereka selama ini dikarenakan bencana lumpur Lapindo. Dengan adanya bencana lumpur ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, baik pekerjaan sebagai petani, buruh pabrik maupun wiraswasta. Bahkan salah satu partisipan berharap agar PT Lapindo juga memenuhi kebutuhan warga selama sisa ganti rugi tahap II belum dibayar, hal ini diungkapkan partisipan sebagai berikut:

“mestinya pemerintah atau PT Lapindo itu memperhatikan kebutuhan kita, kecuali kalau kita sudah pindah dari sini atau sudah mendapatkan uang ganti rugi keseluruhan itu lain lagi, tapi selama kita masih disini mestinya kita harus diperhatikan. Termasuk air bahkan termasuk beras atau sembako mestinya kita harus tetap dijatah sebab apa akibat lumpur ini kan banyak orang yang berhenti kerja kalau tidak kerja kan nggak punya penghasilan jadi harus ditanggung mestinya...(P6)”

Skema 8, tema 8: Kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan fisik



a. Kebutuhan udara sehat

Dua partisipan yang mengungkapkan adanya gangguan bahwa lumpur Lapindo mengeluarkan zat atau gas menyebabkan bau yang tidak sedap

bahkan sangat menyengat. Akibat dari bau tersebut beberapa warga mengeluh mengalami batuk-batuk, bahkan salah satu partisipan memilih memindahkan istri dan ketiga anaknya untuk tinggal di desa karena takut udara di daerah bencana lumpur Lapindo mengganggu kesehatan anak-anaknya.

Sementara itu, Partisipan lain berpendapat bahwa salah satu sebab warga pindah ke rumah baru adalah karena tidak kuat dengan bau uap lumpur Lapindo, apalagi pada saat ada tanggul yang jebol atau pipa spilway bocor, baunya sangat menyengat sekali. Masalah kesehatan yang bisa terjadi akibat udara atau bau lumpur ini adalah masalah pernafasan seperti ungkapan salah satu partisipan berikut ini:

“Kalau masalah pernafasan itu karena baunya disini ini kan terkadang menyengat mas apalagi kalau pas ada kebocoran di *Spilway* (pipa saluran pembuangan lumpur) atau pas tanggulnya ada yang jebol wah baunya menyengat sekali...(P2)”

b. Kebutuhan air sehat

Salah satu partisipan yang mengaku sejak kecil tinggal di desa Pajarakan ini mengungkapkan bahwa sejak adanya luapan lumpur Lapindo pemenuhan kebutuhan air bersih dan sehat terganggu. Sumber air bersih dari sumur-sumur galian di area tanah mereka yang selama ini mereka gunakan untuk mandi dan minum sehari-hari, setelah ada luapan lumpur warnanya menjadi agak putih dan menimbulkan rasa gatal-gatal apabila dipakai untuk mandi.

Partisipan ini menjelaskan bahwa kebutuhan air bersih dan sehat ini penting terutama bagi warga yang tidak mampu. Bagi sebagian warga yang mempunyai uang, air untuk keperluan sehari-hari mereka mampu membeli, termasuk untuk mandi. Namun bagi yang tidak mempunyai uang mereka

memanfaatkan air seadanya, mereka mengabaikan masalah kesehatan yang mereka alami. Pernyataan mengenai kebutuhan air bersih dan sehat disampaikan oleh partisipan berikut ini:

“Ya penyakit kulit, kan airnya itu sudah berubah mas warnanya agak lebih putih dibanding sebelumnya, dan gatal-gatal kalau dipakai...(P2)”

c. Kebutuhan tindakan medis

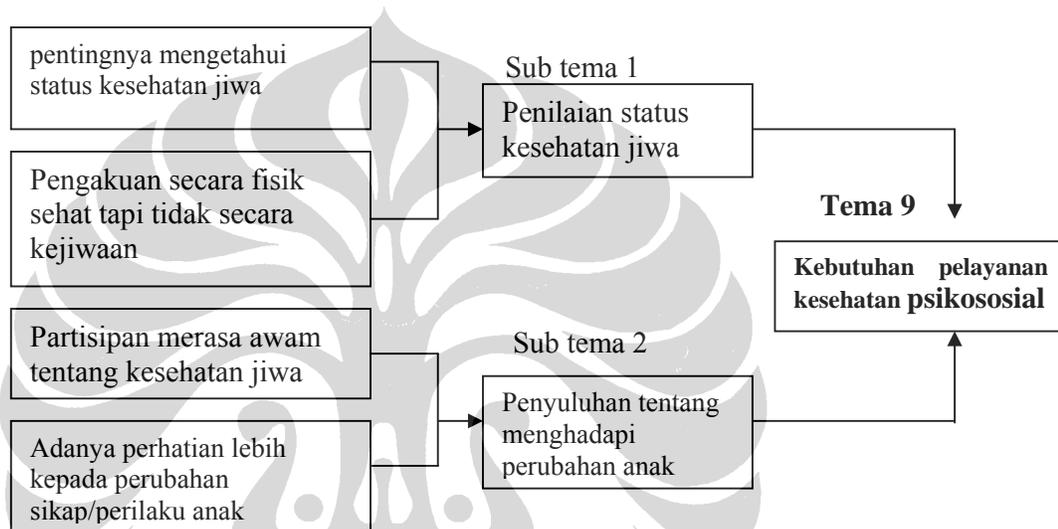
Semua partisipan menyatakan membutuhkan fasilitas pengobatan gratis. Partisipan tersebut berpendapat bahwa masalah kesehatan yang terjadi saat ini seperti masalah udara maupun air yang tidak sehat terjadi sejak adanya luapan lumpur Lapindo. Dengan demikian sudah merupakan suatu keharusan pemerintah maupun PT Lapindo menyediakan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat korban. Partisipan lain menjelaskan bahwa pengobatan gratis ini sangat diperlukan karena warga merasa kondisi mereka sebagai masyarakat korban masih susah, tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan sehingga selama masyarakat korban masih berada di tempat asal atau daerah terdampak atau selama sisa ganti rugi tahap II belum dibayar, layanan pengobatan gratis hendaknya diadakan.

Sementara partisipan lainnya mengakui bahwa layanan pengobatan gratis memang pernah ada pada saat awal terjadinya bencana. Namun setelah warga mendapat uang ganti rugi tahap I, layanan gratis tersebut tidak ada lagi. Selain hal tersebut diatas, hal senada juga dinyatakan oleh salah satu partisipan bahwa di daerah tempat tinggalnya (desa Pajarakan) perlu ada pos kesehatan disertai adanya layanan kesehatan suntik (injeksi), karena

anggapan masyarakat bila berobat tidak ada layanan suntik mereka merasa belum puas, sebagaimana pernyataan partisipan berikut ini:

“Harapan saya supaya ada pos kesehatan gratis dan ada layanan suntik (injeksi) sebab disini kalau hanya diberi obat warga disini tidak tertarik. Padahal banyak masalah kesehatan misalnya batuk-batuk, pusing-pusing dan sebagainya. Dan masyarakat disini kalau tidak di suntik itu tidak puas mas....(P3)”

Skema 9, tema 9: Kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan psikososial



a. Adanya penilaian status kesehatan jiwa

Semua partisipan mengaku telah mengalami perubahan baik secara emosi maupun sosial, namun tidak memahami bagaimana bila ditinjau dari kesehatan jiwa. Menurut salah satu partisipan, selama ini memang mereka tidak mempedulikan perubahan-perubahan sikap atau perilaku yang terjadi karena terfokus pada masalah ganti rugi dan tempat tinggal baru. Mereka menyadari bahwa secara kasat mata fisik mereka sehat namun sebenarnya mereka menyadari bahwa tekanan-tekanan psikologis yang mereka rasakan selama ini sangat besar, sehingga salah satu partisipan mengatakan perlunya

pengukuran status kesehatan jiwa untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa mereka yang sebenarnya, sebagaimana pernyataan partisipan berikut ini:

“kita kan awam tentang kesehatan jiwa. Kalau sakit fisik sih mungkin tahu. Tapi perubahan-perubahan perilaku seperti itu kan kita nggak tahu mas....(P4)”

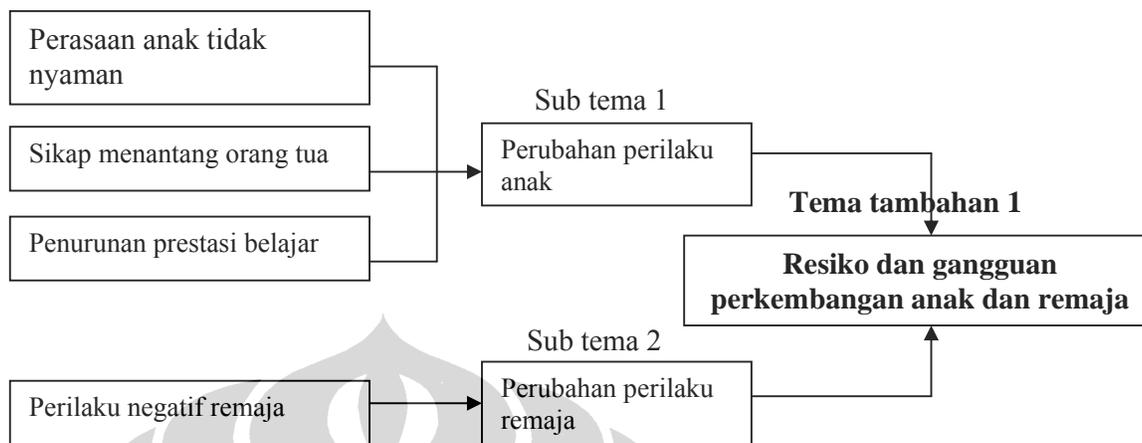
b. Penyuluhan tentang sikap orang tua menghadapi perubahan anak

Salah satu partisipan mengungkapkan adanya perubahan sikap dan perilaku yang terjadi pada anak-anak. Perubahan tersebut menyebabkan orang tua khawatir terhadap masa depan anak-anaknya terutama yang terkait dengan masalah kesehatan jiwanya. Partisipan merasa orang tua yang ada di desa Pajajaran ini tidak mempunyai pengetahuan khusus (awam) mengenai penanganan kesehatan jiwa terutama yang terjadi pada anak-anak. Sehingga berharap ada penyuluhan mengenai cara mengantisipasi atau menghadapi anak-anak yang menjadi korban lumpur Lapindo dengan tepat

Partisipan mengakui pernah ada tindakan dari LSM untuk anak-anak misalnya anak-anak diajak rekreasi atau bermain-main namun sifat tindakan yang diberikan hanya sesaat, sementara orang tua dalam hal ini partisipan tidak diberi pemahaman atau penyuluhan mengenai tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan agar emosi atau kejiwaan anak-anak tetap terjaga dan tidak trauma dengan bencana lumpur Lapindo yang terjadi sebagaimana pernyataan partisipan dibawah ini:

“Kalau dulu ada LSM dan anak-anak diajak rekreasi, bermain tapi kan sesaat tidak ada kelanjutannya sehingga kita bingung lagi bagaimana cara menangani masalah anak yang baik dalam kondisi seperti ini, agar tidak trauma. Itu yang kami harapkan jadi ada kelanjutan bukan hanya sesaat saja. Sebab kita kan awam tentang kesehatan jiwa....(P4)”

Skema 10, tema tambahan 1 : Resiko dan gangguan perkembangan anak dan remaja



a. Perubahan sikap anak

Salah satu partisipan menyatakan adanya perubahan yang dialami anaknya. Menurut partisipan ini, perubahan yang terjadi pada anaknya sekarang misalnya tidak seceria dulu, sering melamun dan berani membantah orang tua. Perubahan itu juga terjadi pada hasil prestasi belajarnya. Hasil nilai belajarnya menurun dibanding sebelum ada bencana lumpur Lapindo.

Perubahan sikap dan prestasi belajar yang terjadi pada salah satu anak partisipan ini dianggap ada hubungannya dengan rencana partisipan untuk pindah rumah dan pindah sekolah bagi anak-anaknya. Anak-anak partisipan tersebut mengaku lebih senang berkumpul dengan teman-temannya sekarang dibanding ditempat barunya nanti sebagaimana ungkapan anak yang disampaikan partisipan berikut ini:

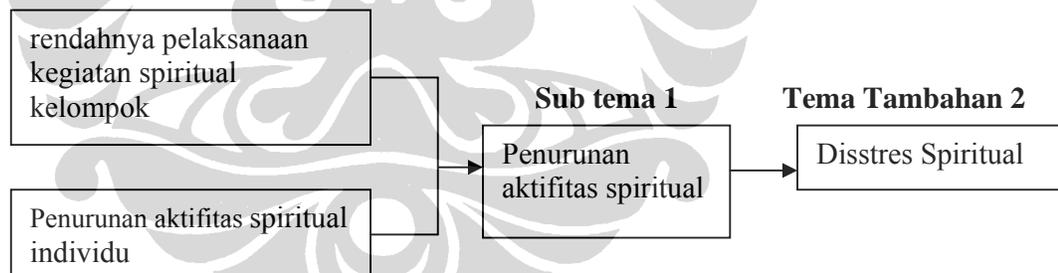
“nggak enak pak, enak disini sama teman-teman...(P4)”

b. Perubahan perilaku remaja

Dua partisipan menyatakan perubahan perilaku yang terjadi pada remaja, yaitu mengalami perubahan dibanding sebelum ada bencana lumpur Lapindo. Satu partisipan mengungkapkan bahwa perubahan yang terjadi pada remaja disebabkan karena kurangnya aktifitas positif yang ada di desa Pajarakan ini. Kalau dulu mereka ada kegiatan keagamaan yang rutin setiap minggu mereka adakan, sekarang kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi. Sedangkan partisipan lainnya beranggapan bahwa mereka tinggal di sini (desa Pajarakan hanya menunggu waktu pembayaran sisa ganti rugi tahap II saja) sehingga membuat para remaja ini menghabiskan waktu dengan bersenang-senang dan berfoya-foya saja sebagaimana ungkapan partisipan berikut ini:

“remaja hanya main-main saja, minum-minuman keras, keluyuran, pokoknya foya-foya saja....(P4)”

Skema 11, Tema tambahan 2: Distress Spiritual



a. Penurunan aktifitas spiritual

Penurunan aktifitas spritual yang terjadi di desa Pajarakan diungkapkan oleh lima partisipan. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya warga banyak yang pindah rumah dan konsentrasi warga yang terpecah akibat bencana lumpur lapindo ini, misalnya karena tidak adanya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta belum adanya pekerjaan tetap

atau masalah tempat tinggal yang hingga kini masih belum terwujud. Beberapa kegiatan keagamaan seperti Dziba' Sura, Dziba' Kubro, dan Tahlillan yang dulu rutin diadakan oleh Ibu-Ibu dengan jumlah peserta mencapai 50 orang, sekarang ini berhenti semua, seperti ungkapan partisipan yang mengaku selama ini aktif mengikuti kegiatan keagamaan berikut ini:

”kumpulan-kumpulan keagamaan yang dulu ada sekarang sudah tidak berlaku, dari Dziba Sura, Dziba Kubro, Tahlilan berhenti semua. Yang jelas perubahan nya besar sekali”

Meskipun tidak separah yang dialami Ibu-Ibu, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh bapak-bapak juga mengalami perubahan. Kegiatan Tahlillan hingga kini masih diadakan meskipun hanya kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu misalnya memperingati hari-hari besar keagamaan saja, tidak seperti dulu diadakan secara rutin setiap malam jum'at. Partisipan lain berpendapat bahwa perubahan aktifitas keagamaan yang terjadi dapat dilihat dari jumlah jama'ah yang sholat di masjid. Dulu sebelum ada lumpur jumlah shaf (barisan sholat) paling tidak 3-4 shaf penuh, namun sekarang satu shaf saja tidak penuh bahkan terkadang hanya beberapa orang saja. Penurunan aktifitas spiritual ini menurut salah satu partisipan yang dulu aktif sholat di masjid disebabkan karena pikirannya tidak fokus semenjak pembayaran ganti rugi tahap I sebagaimana yang diungkapkan partisipan berikut ini:

“Masalah keagamaan walaupun sudah menurun tapi masih berjalan, kalau saya menurun karena pikiran kacau sehingga tidak terfokus, beda dengan dulu sholat saya tenang semenjak DP 20% cair, pikiran semakin kacau ibadah tidak tenang, karena saya mikir, bingung, saya harus kemana, pikiran itu terus menghantui saya...(P4)”

Bertentangan dengan partisipan lainnya, dua partisipan mengaku adanya peningkatan dalam melakukan aktifitas keagamaan. Bentuk ibadah yang dianggap meningkat misalnya datang ke masjid lebih awal yang sebelumnya jarang tepat waktu karena masih sibuk bekerja di sawah, lebih banyak waktu untuk membaca kitab-kitab agama yang mereka miliki atau peningkatan itu berupa perasaan lebih khusuk dalam memanjatkan do'a supaya dikabulkan dan diberi kesabaran. Peningkatan aktifitas ibadah tersebut umumnya terjadi karena sudah tidak bekerja sehingga mempunyai banyak waktu luang untuk beribadah, sebagaimana ungkapan partisipan berikut ini:

“menjadi lebih dekat, lebih tenang ibadahnya karena tidak kerja, saya selalu berdo'a supaya sabar dan 80% cepat cair....(P1)”

